

Tolak Rangkap Jabatan, Wiranto Dinilai Lebih Konsisten daripada Jokowi

IHSANUDDIN

Kompas.com - 19/01/2018, 08:10 WIB



Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto usai menjadi pembicara kunci pada 6th Action Asia Peacebuilders Forum, di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017). (KOMPAS.com/Kristian Erdianto)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komarudin mengapresiasi langkah [Wiranto](#) menolak menjadi ketua umum Partai Hanura.

Padahal, menurut Ujang, Wiranto memiliki kesempatan besar untuk kembali memimpin Hanura setelah terjadi kisruh kepemimpinan di parpol yang didirikannya itu.

Namun, Wiranto menolak [rangkap jabatan](#) dan memutuskan tetap fokus pada jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Kemananan.

Ujang menilai, sikap Wiranto ini lebih konsisten ketimbang Presiden Joko Widodo yang justru mengizinkan Airlangga Hartarto rangkap jabatan sebagai menteri perindustrian dan ketua umum Partai Golkar.

"Itu sesuatu yang baik yang pak Wiranto lakukan. Beliau bisa saja mengambil alih (kepemimpinan Hanura) tapi tidak dilakukan karena ada komitmen dari awal untuk tidak rangkap jabatan. Patuh terhadap himbauan larangan Pak [Jokowi](#) itu," kata Ujang kepada *Kompas.com*, Jumat (19/1/2018).

Sebaliknya, lanjut Ujang, Presiden Jokowi justru tidak konsisten dengan larangan rangkap jabatan yang dibuatnya sendiri dengan mempertahankan Airlangga.

(Baca juga: [PAN Minta Jokowi Konsisten soal Larangan Rangkap Jabatan](#))

Jokowi beralasan sisa masa pemerintahan tinggal satu setengah tahun sehingga sulit untuk mencari sosok pengganti Airlangga.

"Tentu ini preseden tidak baik. Harusnya pemimpin beri contoh apa yang dikatakan dulu dan sekarang harus konsisten," kata dia.

Ujang pun menduga, Jokowi rela melanggar komitmennya ini demi garansi dukungan Golkar di pemilu presiden 2019.

Apalagi, selain mempertahankan Airlangga, Jokowi juga menambah satu lagi jatah menteri untuk Golkar.

Jokowi mempercayai Sekjen Golkar Idrus Marham untuk menjabat Mensos menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju Pilkada Jatim.

"Golkar akan menggaransi, akan full mendukung Pak Jokowi di 2019. Itu dealnya saya yakin," kata dia.

(Baca juga: [Lewat WhatsApp, Wiranto Legawa dan Dukung Kepemimpinan Baru Hanura](#))

Kemarin, Kamis (18/1/2018), menanggapi konflik di tubuh partai yang didirikannya, Wiranto mengirimkan pesan yang dibacakan oleh Ketua DPP Hanura Dosi Iskandar dalam acara Munaslub kubu Daryatmo.

Berikut isi pesan yang dikirim lewat aplikasi *WhatsApp* itu:

"Pada posisi sebagai Menkopolhukam, saya harus tetap konsisten membantu Presiden membaktikan diri saya menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Tugas yang membutuhkan perhatian dan kemampuan saya sepenuhnya.

Untuk itu saya legowo dan akan mendukung sepenuhnya partai hanuradipimpin oleh orang orang yg berkualitas, bermoral dan memiliki kemampuan manajerial yang handal.

Sebagai Ketua Dewan Pembina yang mendirikan partai ini saya sangat sadar bahwa besar kecilnya partai akan sangat ditentukan kekuatan riil pemilik partai yakni seluruh anggota dan simpatisanya di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, yang diwakili Dewan Perwakilan Provinsi dan DPC kabupaten kota seluruh Indonesia.

Siapapun dan dengan cara apapun tidak bisa mencegah hak politik pemilik partai ini. Oleh sebab itu saya akan terus mendukung dan bersama sama dengan saudara-saudara berjuang untuk eksistensi Partai Hanura.

*Selamat berjuang semoga tuhan merestui perjuangan Partai Hanura. Tertanda,
Wiranto."*